



# **RENCANA KERJA (RENJA-POKOK) TAHUN ANGGARAN 2023**

**DINAS PARIWISATA  
KOTA MAKASSAR**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Pariwisata Kota Makassar ini dapat disusun.

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Pariwisata Kota Makassar ini menggambarkan Rencana Kerja Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh masing-masing bidang dalam lingkup Dinas Pariwisata Kota Makassar. Selain itu Rencana Kerja Tahun 2023 ini adalah rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Makassar Tahun 2023 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 yang diharapkan dapat menjadi acuan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kota Makassar.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2023 ini dibuat untuk menjadi bahan sesuai ketentuan perundangan.

Makassar, Juni 2022

The image shows a circular official stamp of the Makassar City Government, Department of Tourism. The stamp contains the text "PEMERINTAH KOTA MAKASSAR" around the perimeter and "DINAS PARIWISATA" in the center. A handwritten signature in blue ink is written over the stamp. Below the stamp, the name "MUHAMMAD ROEM, S.STP, M.Si" is printed, followed by "Pangkat: Pembina" and "Nip : 19831110 200212 1001".

**KEPALA DINAS**  
**MUHAMMAD ROEM, S.STP, M.Si**  
Pangkat: Pembina  
Nip : 19831110 200212 1001

## DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN		i
KATA PENGANTAR		ii
DAFTAR ISI		iii
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU	10
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA	33
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA	37
BAB IV	PENUTUP	43
LAMPIRAN :		
Lampiran 1 : Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2021		
Lampiran 2 : Evaluasi Rencana kerja Tahun 2022 Triwulan II		
Lampiran 3 : Rekapitulasi Renja Tahun 2023		

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata agar lebih berkualitas, Dinas Pariwisata Kota Makassar selaku penanggung jawab teknis Penyelenggaraan Pembangunan daerah dalam Bidang Pariwisata berkewajiban menyusun Rencana Kerja (Renja) tahun 2023 sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenan dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kota Makassar Tahun 2023.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra OPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian, RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pemerintah daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan RENJA OPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

Sebagai dokumen resmi pemerintah daerah, Rencana Kerja OPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan

penganggaran tahunan. Oleh karena itu, RKPD dan RENJA OPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja OPD (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang Pariwisata tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar direncanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolak ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.

Dinas Pariwisata Kota Makassar yang menangani Urusan Pemerintahan Pilihan Pariwisata dengan mengacu pada Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009, Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 (Lampiran VI) tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja OPD (Renja OPD), Permendagri 86 Tahun 2017, Permendagri 90 Tahun 2019, dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 kemudian menyusun Rencana Kerja (Renja) di bidang Pariwisata dengan maksud menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja OPD (OPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan Tahun Anggaran 2022.

Rencana Kerja di bidang Pariwisata sebagai Penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Makassar merupakan sebuah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Pariwisata dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Kota Makassar.

## **1.2 Landasan Hukum.**

- 1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1822);
- 2) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4) Undang-undang Nomor 10 tentang Kepariwisataaan;
- 5) Undang-undang nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan kabupaten-Kabupaten Gowa, maros, dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan daerah Propinsi sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193);
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 11) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
- 12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

- Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
  - 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - 15) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 440-842 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Normal 440-830 Tahun 2020 tentang Pedoman Tatanan Normal Baru Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
  - 16) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi OPD (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016);
  - 17) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
  - 18) Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021);
  - 19) Peraturan Walikota Makassar Nomor 73 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 53 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - 20) Peraturan Walikota Makassar Nomor 79 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Event Kepariwisata pada Dinas Parwisata;
  - 21) Peraturan Walikota Makassar Nomor 80 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Pantai Losari pada Dinas Pariwisata;

- 22) Peraturan Walikota Makassar Nomor 106 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Makassar Nomor 108 Tahun 2021);
- 23) Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023.

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagai Dokumen Perencanaan OPD untuk periode satu tahun, Rencana Kerja memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, baik itu dalam bentuk kerangka regulasi maupun dalam bentuk kerangka anggaran. Rencana Kerja OPD dimaksudkan sebagai patokan RKA-OPD sehingga setiap kegiatan OPD menjadi jelas dan terarah, serta pencapaian sasaran dapat terukur, baik dari segi sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi serta dana. Dengan terukurnya outcome (hasil) dari kegiatan OPD mencerminkan kinerja suatu OPD.

Penyusunan Rencana Kerja bertujuan :

- a. Penyelarasan program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang dan seksi OPD.
- b. Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi di masing-masing bidang dan seksi OPD.
- c. Penyelarasan program dan kegiatan OPD dalam mengoptimalkan pencapaian sasaran sesuai visi dan misi dan Tugas Pokok dan Fungsi OPD.
- d. Penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas pagu indikatif untuk masing-masing OPD.

### 1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pariwisata Kota Makassar disusun sebagai berikut :

#### BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Dinas Pariwisata agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

### 1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Dinas Pariwisata, Proses penyusunan Renja, Keterkaitan antara Renja dengan Dokumen RKPD, Renstra, Renja K/L dan Renja provinsi/kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan OPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran OPD.

### 1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pariwisata.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pariwisata, serta susunan garis besar isi dokumen.

## BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

### 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun 2019) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2020), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja OPD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu, dan realisasi Renstra OPD mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan OPD dan/atau realisasi APBD untuk OPD yang bersangkutan.

### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam

SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

### 2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan OPD;

Khusus provinsi, uraikan mengenai koordinasi dan sinergi program antara OPD provinsi dengan OPD kabupaten/kota serta dengan kementerian dan lembaga di tingkat pusat dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/ internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan OPD; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan

kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

#### 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/ kota (bila sudah dilakukan).

Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain:

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD.

### BAB III. TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA

#### 3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD.

#### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

### BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA

#### 4.1 Program, Kegiatan, dan Pendanaan OPD

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Misal:

1. Pencapaian visi dan misi kepala daerah,
  2. Pencapaian MDGs,
  3. Pengentasan kemiskinan,
  4. Pencapaian SPM,
  5. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah,
  6. Pengembangan daerah terisolir,
  7. Dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
- Jumlah program dan jumlah kegiatan;
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu);
  - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

#### BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

**BAB II****EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU****2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD****2.1.1 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2021 (Tahun Lalu)**

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2021 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2021 meliputi 2 (dua) hal, pelaksanaan rencana program & kegiatan dan hasil rencana program & kegiatan.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian Renstra Dinas Pariwisata sampai dengan tahun 2021 dapat diuraikan pada lampiran 1 (menurut lampiran VI Permendagri 54 Tahun 2010):

Dari lampiran 1, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja OPD dan Pencapaian Renstra OPD sampai dengan tahun 2021 dapat kita lihat terbagi ke dalam tiga bagian penting yakni;

- a. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- b. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- c. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Selama tahun 2021, Dinas Pariwisata Kota Makassar telah melaksanakan 5 program, 14 kegiatan, dan 39 sub kegiatan, terdiri dari 1 program pendukung (6 kegiatan dan 23 sub kegiatan) dan 4 program utama (8 kegiatan dan 16 sub kegiatan). Realisasi total (program utama dan pendukung) rata-rata capaian target kinerja 75,95% dengan predikat **Sedang (S)**, sementara total realisasi rata-rata capaian anggaran sebesar 80,58% dengan predikat **Sedang (S)**.

Realisasi rata-rata capaian target kinerja program utama adalah 70,53% dengan predikat **Sedang (S)**, sedangkan realisasi capaian target anggaran program pendukung sebesar 97,63% dengan predikat **Tinggi (T)**.

Untuk realisasi capaian target kinerja anggaran program pendukung adalah 108,78% dari target renja tahun 2021 dengan predikat **Sangat Tinggi (ST)**, sedangkan realisasi capaian target kinerja anggaran program utama adalah sebesar 60,53% dengan predikat **Sedang (S)**.

Dari 4 program utama tersebut masih tetap berlanjut ke periode Renja 2023. 4 program utama yang masih berlanjut tersebut adalah : 1) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif, 2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata, 3) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan, 4) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Pariwisata. Masih berlanjutnya 4 program utama tersebut karena masih sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 setelah hasil pemetaan.

Untuk program penunjang/pendukung ada 1 program yang masih berlanjut ke Renja berikutnya yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

#### 2.1.2 Evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun 2022 (Tahun Berjalan)

Selama triwulan II tahun 2022, Dinas Pariwisata Kota Makassar melaksanakan 5 program, 15 kegiatan, dan 53 sub kegiatan yang terdiri dari 1 program pendukung (7 kegiatan dan 30 sub kegiatan) dan 4 program utama (8 kegiatan dan 23 sub kegiatan). Realisasi total (program utama dan pendukung) rata-rata capaian target kinerja 37,92% dengan predikat **Sangat Rendah (SR)**, sementara total realisasi rata-rata capaian anggaran sebesar 18,64% dengan predikat **Sangat Rendah (SR)**. Adapun secara rinci evaluasi program utama dan pendukung sampai triwulan II tahun 2022 adalah sebagai berikut:

##### **Program Pendukung**

#### **1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yakni; a) Persentase ASN Perangkat Daerah yang Mendapat Peningkatan Kapasitas dengan Target Kinerja 90%, b) Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah dengan Target Kinerja 100%, dan c) Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik dengan Target Kinerja 90%. Total anggaran yang mendukung program ini adalah sebesar Rp. 12.161.815.025,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 44,44% untuk indikator Persentase ASN Perangkat Daerah yang

Mendapat Peningkatan Kapasitas, 18,09% untuk indikator Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah, dan 60% untuk indikator Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 5.080.541.490,- atau 41,77%. *Rata-rata Capaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2022 yakni sebesar 53,31% dengan kategori Sangat Rendah.*

**Adapun faktor Pendorong** : adalah adanya kerja sama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal serta motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata.

**Faktor penghambat program ini adalah** : adanya proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi.

**Tindak Lanjutnya** : yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah semua kegiatan dan sub kegiatan harus terus dioptimalkan dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas pariwisata Kota Makassar.

#### **Program Utama**

##### **1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata**

Indikator kinerja program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata yaitu a) Jumlah Destinasi Wisata yang Berstandar Nasional dengan target 1 DTW, dan b) Tingkat Hunian Akomodasi dengan target 43%. Total anggaran yang mendukung program ini adalah sebesar Rp. 28.965.042.200,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 100% untuk indikator Jumlah Destinasi Wisata yang Berstandar Nasional dan 27,91% untuk indikator Tingkat Hunian Akomodasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 1.704.959.566,- atau 27,23%. *Rata-rata Capaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2022 yakni sebesar 44,83% dengan kategori Sangat Rendah.*

**Adapun faktor Pendorong** : adalah adanya kerja sama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal serta motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata.

**Faktor penghambat program ini adalah** : adanya beberapa kegiatan/rekening belanja modal yang masih sementara dalam proses lelang dan masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten

**Tindak Lanjutnya** : yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah semua kegiatan dan sub kegiatan harus terus dioptimalkan dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas pariwisata Kota Makassar.

## 2. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Indikator kinerja program Pemasaran Pariwisata yaitu a) Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara yang Datang ke-Kota Makassar dengan target kinerja 5%, dan b) Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Perkebangsaan dengan target 3%. Total anggaran yang mendukung program ini sebesar Rp. 9.066.567.000,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 0% (Indikator kinerja dapat dicapai di akhir tahun) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 2.130.244.358,- atau sebesar 23,50%. *Rata-rata Capaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2021 yakni sebesar 48,20% dengan kategori Sangat Rendah.*

**Adapun faktor Pendorong** : adalah digital tourism menjadi cara yang efektif untuk kondisi saat ini, co branding siap membantu meningkatkan angka kunjungan wisatawan melalui kerjasama terpadu dengan pemerintah kota, dan kerjasama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal.

**Faktor penghambat program ini adalah** : masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten dan proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi.

**Tindak Lanjutnya** : kerjasama dengan brand-brand yang telah menjadi mitra Co Branding Kemenpar, memaksimalkan fungsi TIC (Tourism Information Centre) yang dimiliki, dan semua kegiatan dan sub kegiatan harus terus dioptimalkan dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas Pariwisata.

## 3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Indikator kinerja program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yaitu a) Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Mendapatkan HAKI dengan target kinerja 75 Orang, dan b) Persentase PAD Sektor Ekonomi Kreatif dengan target dikator sebesar 15,10%. Total anggaran yang mendukung program ini sebesar Rp. 10.718.715.875,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 12 Orang untuk indikator Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang Difasilitasi Mendapatkan HAKI dan 0% untuk indikator Persentase PAD Sektor Ekonomi Kreatif dengan realisasi anggaran

sebesar Rp. 1.797.914.778,- atau 16,77%. Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2022 yakni sebesar 7,16% dengan kategori sangat rendah.

**Adapun faktor Pendorong** : adalah adanya kerja sama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal serta motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata.

**Faktor penghambat program ini adalah** : masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten dan adanya proses pencairan dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi.

**Tindak Lanjutnya** : yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah semua kegiatan dan sub kegiatan harus terus dioptimalkan dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas pariwisata Kota Makassar.

#### 4. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Indikator kinerja program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dengan indikator yakni a) Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata dengan target kinerja 750 Orang, b) Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas dengan target kinerja 10%, dan c) Persentase SDM Pariwisata yang Mendapat Sertifikasi dengan target kinerja sebesar 6,4%. Total anggaran yang mendukung program ini sebesar Rp. 3.198.325.900,-. Adapun capaian kinerja sampai Triwulan II sebesar 26,67% untuk (200 orang) untuk indikator Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata, 80% untuk indikator Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapatkan Peningkatan Kapasitas, dan 31,25% untuk indikator Persentase SDM Pariwisata yang Mendapat Sertifikasi dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 880.760.700,- atau 27,54%. Rata –rata Capaian kinerja sampai Triwulan II tahun 2022 yakni sebesar 36,10% dengan predikat sangat rendah.

**Adapun faktor Pendorong** : adalah adanya kerja sama yang baik antar pejabat teknis dan pihak ketiga yang berjalan maksimal, motivasi dari pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata, dan tingginya antusias tenaga kerja pariwisata untuk mengikuti sertifikasi kompetensi tenaga kerja kepariwisataan.

**Faktor penghambat program ini adalah** : masih lemahnya dukungan sumber daya manusia yang berkompeten dan adanya proses pencairan

dana yang terhambat karena pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan yang belum terpenuhi.

**Tindak Lanjutnya** : yang diperlukan dalam triwulan berikutnya adalah semua kegiatan dan sub kegiatan harus terus dioptimalkan dalam upaya pencapaian target kinerja Dinas pariwisata Kota Makassar dan dibutuhkan anggaran yang maksimal untuk kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.

Dari 5 program pendukung dan utama tersebut semuanya berlanjut ke periode RKPD tahun 2023. Satu program pendukung yang berlanjut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten/Kota dan empat program utama yang masih berlanjut tersebut adalah: 1) Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, 2) Program Pemasaran Pariwisata, 3) Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dan 4) Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2023 memperhatikan beberapa unsur pokok sebagaimana berikut: a) Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya, b) Tujuan yang dikehendaki, c) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya, dan d) Kebijakan untuk melaksanakannya. Penyusunan Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar untuk tahun 2023 juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2021 (tahun lalu) dan hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2022 (tahun berjalan) sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2023;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.

Berdasarkan lampiran 1 dan 2, Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Pariwisata tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 dapat kita lihat, tidak semua program yang telah direncanakan dalam Renstra terealisasi bahkan ada program/kegiatan yang melebihi dari target kinerja hasil/keluaran yang telah direncanakan. Keterbatasan anggaran dan kebijakan sebagai dampak dari wabah Virus korona (COVID-19) merupakan salah satu faktor yang mengakibatkan Dinas Pariwisata Kota Makassar tidak leluasa dalam melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan.

Namun secara keseluruhan dari lampiran 1 dan 2 dapat kita lihat bahwa hampir semua program kerja Dinas Pariwisata Kota Makassar sampai tahun 2021 (lampiran 1) terealisasi masih dibawah rata-rata. Begitupun di tahun 2022 (Triwulan II/lampiran 2) terealisasi masih dibawah rata-rata.

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Acuan dalam menganalisis kinerja pelayanan OPD berdasarkan indikator kinerja dapat menggunakan SPM untuk mengukur jenis dan mutu pelayanan dasar dan IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Berdasarkan fungsi serta kewenangan Dinas Pariwisata Kota Makassar maka indikator Kinerja Dinas Pariwisata Kota Makassar berdasarkan analisis standar kebutuhan pelayanan yang ditetapkan sebagai tolak ukur keberhasilan dari program dan kegiatan adalah;

1. Meningkatnya daya tarik wisata dengan indikator persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara dan persentase peningkatan pergerakan wisatawan nusantara;
2. Meningkatnya daya saing wisata dengan indikator lama tinggal wisatawan; dan
3. Meningkatnya pendapatan daerah dengan indikator persentase PAD dari sektor pariwisata.

Dinas Pariwisata Kota Makassar tahun 2022 mengadakan pengukuran capaian kinerja pada kegiatan yang dananya bersumber dari R-APBD. Dengan memperhatikan Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja Dinas Pariwisata Kota Makassar maka pencapaian kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Berdasarkan Tabel 2.1, dari 3 indikator kinerja sasaran pelayanan SKPD, satu indikator masih belum ada capaiannya (0%) karena pengukuran capaian kinerja hanya dapat dilakukan di akhir periode tahun 2022. Sementara untuk dua indikator sasaran telah dicapai sebagaimana pada tabel 2.1 berikut;

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pariwisata**  
**Kota Makassar**

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi OPD	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renja OPD Tahun 2022	Realisasi Capaian Triwulan I s/d II	Proyeksi Tahun 2022	Catatan Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(10)		(15)
1	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan			4,96%	--	4,96%	
2	Lama Tinggal Wisatawan			3 Hari	1,19 Hari	3 Hari	
3	Persentase PAD dari Sektor Pariwisata			19,70%	34,10%	19,70%	

### 2.3 Isu-isu penting penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan Peraturan Walikota Kota Makassar Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pariwisata, Dinas Pariwisata mempunyai tugas dan fungsi;

- a. Melaksanakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata dan pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual;
- b. Mengelola Daya Tarik Wisata, Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata;
- c. Menetapkan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP);
- d. Melakukan pemasaran pariwisata;
- e. Menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- f. Melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

Merujuk pada tugas dan fungsi Dinas Pariwisata, terdapat beberapa isu strategis yang dianggap prioritas pada penentuan fokus arah kegiatan sektor Pariwisata, yang harus menjadi perhatian Dinas Pariwisata Kota Makassar dalam penentuan strategi dan kebijakan untuk mewujudkan peran pembangunan Pariwisata di wilayah Kota Makassar. Isu strategis yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata adalah sebagai berikut :

### **1. Belum optimalnya dampak promosi dan pemasaran pariwisata**

Upaya promosi dan pemasaran pariwisata yang dilakukan selama ini terlihat belum berdampak signifikan karena pemanfaatan media promosi yang belum optimal sehingga promosi serta informasi pariwisata yang ingin disampaikan pun tidak dapat dijangkau secara luas oleh para wisatawan. Selain itu pelaksanaan berbagai bentuk kegiatan baik yang berskala lokal, nasional dan internasional yang dilaksanakan tidak diawali dengan perencanaan yang matang sehingga konten yang disajikan kurang menarik, selain itu kegiatan yang dilaksanakan kurang variatif dan beragam sehingga tujuan utama pelaksanaan kegiatan tersebut yakni meningkatkan angka kunjungan wisatawan menjadi sulit terwujud.

### **2. Rendahnya kualitas dan daya saing destinasi pariwisata**

Kota Makassar memiliki daya tarik wisata yang sangat beragam, baik pantai, pulau, sungai, kuliner, hiburan dan lain sebagainya. Keragaman daya tarik wisata yang ada saat ini tentu membutuhkan sarana dan prasana pendukung dalam pemanfaatannya. Masih rendahnya kualitas aksesibilitas tentu akan mempengaruhi kemampuan wisatawan untuk menjangkau destinasi pariwisata yang ada, selain itu masih terbatasnya sarana akomodasi yang ada pada destinasi menjadi masalah tersendiri yang harus dapat dipecahkan secara bersama, karena ketersediaan sarana dan prasarana pada daya tarik wisata tentu akan mempengaruhi angka kunjungan wisatawan.

### **3. Masih rendahnya pengembangan ekonomi kreatif berbasis seni dan budaya**

Pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia dihadapkan pada berbagai permasalahan yakni masih rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga kerja, akselerasi pertumbuhan ekonomi kreatif memerlukan dukungan tenaga kerja yang memiliki mindset kreatif dan inovatif. Sektor ekonomi kreatif belum banyak menarik investor untuk menanamkan modalnya, sampai saat ini sektor tersebut masih dianggap belum memiliki daya tarik yang kuat untuk berinvestasi, prospek bisnis di sektor ekonomi kreatif masih rendah dan dinilai masih berisiko tinggi sehingga sulit untuk mendapatkan pembiayaan perbankan. Pengembangan ekonomi kreatif masih menghadapi sulitnya akses pasar produk kreatif, hal ini disebabkan belum terbangunnya rantai distribusi produk kreatif Indonesia ke pasar dunia. Sementara itu ketersediaan infrastruktur dan teknologi merupakan

persyaratan utama untuk meningkatkan daya saing industri kreatif Indonesia, namun demikian kondisi infrastruktur bagi ekonomi kreatif masih belum memadai

#### **4. Belum optimalnya kompetensi dan kapabilitas SDM Pariwisata**

Pembangunan kepariwisataan memerlukan peran aktif SDM, baik aparatur, pelaku usaha dan tenaga kerja, maupun masyarakat. Keterbatasan kemampuan aparatur pemerintah bidang pariwisata disebabkan minimnya pengetahuan kepariwisataan dan sering terjadinya perpindahan aparatur. Sedangkan tingkat profesionalisme SDM sangat ditentukan oleh kualitas dari pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan (*the right man not in the right place*) serta tidak jelasnya uraian tugas masing-masing staf membuat pembagian tugas menjadi tidak jelas sehingga pekerjaan masih bertumpuk pada beberapa orang staf saja.

#### **5. Belum optimalnya sinergitas dan kemitraan**

Kemitraan dan kerjasama Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, antar pemerintah, swasta (industri pariwisata) dan masyarakat, sangat diperlukan dalam mendorong pencapaian tujuan pembangunan kepariwisataan. Sektor publik atau pemerintah berperan dalam menyediakan infrastruktur dan kerangka regulasi yang dapat mendorong swasta dan masyarakat ikut berpartisipasi aktif dalam pembangunan kepariwisataan.

Isu-isu strategis tersebut, jika tidak diantisipasi saat ini akan berdampak terhadap pencapaian tujuan dan fungsi Dinas Pariwisata, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Pariwisata Kota Makassar telah menyiapkan 4 program utama, dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata diharapkan dapat mengelola daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata, destinasi pariwisata kabupaten/kota, dan menetapkan tanda daftar usaha pariwisata kabupaten/kota.
- b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata diharapkan dapat melakukan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi, dan kawasan strategis pariwisata kabupaten/kota.
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual diharapkan dapat menyediakan prasarana (zona kreatif/ ruang kreatif/ kota kreatif) sebagai ruang

berekspresi, berpromosi, dan berinteraksi bagi insan kreatif di Daerah kabupaten/kota.

- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif diharapkan dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2022 dan capaian kinerja dalam RPJMD Kota Makassar 2021-2026, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, sesuai petunjuk Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/6802/Bangda tanggal 16 Desember 2019, perihal Penyusunan RKPD Tahun 2021 Kota Makassar.

Penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2023 juga berpedoman pada Permendagri No 90 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Permendagri 100 tentang penerapan SPM dan serta mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023. Sedangkan untuk sistematika dan tata cara penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Darah, Sera Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan; kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan permukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal tersebut, maka

dapat dirumuskan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 2.2**  
**Tujuan dan Sasaran Pembangunan**

No	Tujuan RKPD 2023	Sasaran RKPD 2023
1	Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)	1) Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan 2) Meningkatnya Daya Beli Masyarakat
2	Mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang Bersih dan Efektif	1) Terwujudnya Pelayanan Publik yang “Sombere dan Smart” 2) Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
3	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat dan Migitasi Sosial	1) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 2) Meningkatnya Kualitas Perlindungan Masyarakat Miskin
4	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata	1) Tersedianya Kemudahan Akses Peluang Kerja dan Peluang Bisnis Baru 2) Terwujudnya Gerakan Masyarakat memperkuat Ketahanan Ekonomi
5	Mewujudkan Makassar menjadi “Livable City’ dan “Resilient City”	1) Tersedianya Infrastruktur Kota Menuju Kota Nyaman 2) Meningkatnya Tata Kelola Lingkungan Hidup yang Lestari

Arah kebijakan pembangunan sebagai urusan perencanaan daerah di Kota Makassar masih mengacu pada RPJMD Kota Makassar Tahun 2021 s/d 2026. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Visi Kota Makassar 2021 s/d 2026 adalah: ” **Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang "Sombere' & Smart City" dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua**” sehingga untuk menjamin konsistensi serta kesinambungan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah, perhatian difokuskan pada prioritas kebijakan yang menjadi arahan RPJMD untuk periode 2021-2026.

berdasarkan tabel 2.2 Arah kebijakan ekonomi Kota Makassar 2021-2026 diselaraskan dengan sasaran dan arah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah maka Dinas pariwisata memiliki posisi di misi 1, 2, dan 3 yakni ;

1. Misi 1 “Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi” dengan tujuan “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pada sasaran “Meningkatnya

Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan (1.1.1)”.

2. Misi 2 “Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota yang Kuat untuk Semua” dengan tujuan “Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata” pada sasaran “Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi (2.2.2)”
3. Misi 3 “Restorasi Ruang Kota yang Inklusif Menuju Kota Nyaman Kelas Dunia yang ‘Sombere’ dan Smart City” untuk Semua, dengan Tujuan Mewujudkan Makassar Menjadi “Livable City” dan “Resilient City” pada sasaran “Tersedianya Infrastruktur Kota Menuju Kota Nyaman (3.1.1)”

**Tabel 2.3**  
**Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Program Dinas Pariwisata Kota Makassar**  
**Tahun 2021-2026**

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Program
Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang "Sombere dan Smart City" dengan Imunitas Kota yang Kuat untuk Semua	1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi	Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (1.1)	Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan (1.1.1)	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (3.26.05)
	2. Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi dan Kesehatan Kota yang Kuat untuk Semua	Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata (2.2)	Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat Ketahanan Ekonomi (2.2.2)	Pemasaran Pariwisata (3.26.03)
	3. Restorasi Ruang Kota yang Inklusif Menuju Kota Nyaman Kelas Dunia yang "Sombere" dan Smart City" untuk Semua	Mewujudkan Makassar menjadi "Livable City" dan "Resilient City" (3.1)	Tersedianya Infrastruktur Kota Menuju Kota Nyaman (3.1.1)	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata (3.26.02)

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan

berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra OPD dan tingkat kinerja yang dicapai oleh OPD, dengan arahan kepala daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap OPD berdasarkan rancangan awal RKPD.

## 2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan kota, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Pariwisata maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kota diuraikan pada tabel 2.4 berikut;

**Tabel 2.4**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022**  
**Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2023**  
**Kota Makassar**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kota Makassar

Pokir (Reses)

NO	USULAN_MASALAH	PENGUSUL	KAMUS_USULAN	ALAMAT_LOKASI	Keterangan
1	Kawasan Wisata di daerah bung khususnya daerah dekat sungai (dermaga)	AL HIDAYAT SAMSU, S.Pd (Fraksi PDI-Perjuangan)	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Baruga BTN Bumi Bung Permai RT 06 RW 07 Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalenrea Kota Makassar	diakomodir
2	Perlu perhatian pemerintah untuk turut memperhatikan pendidikan moral keagamaan bagi warga	ANDI HADI IBRAHIM BASO, SS, MA (Fraksi P K S)	Pengembangan Pendidikan	BTN Mangga Tiga RT 003 / RW 007 Kel. Paccerrakkang Kec. Biringkanaya, Kota Makassar	bukan tupoksi dinas pariwisata
3	Bantuan dan pembinaan pengelolaan wilayah wisata pesisir	ARI ASHARI ILHAM, SE (Fraksi Partai Nasdem)	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Pantai Angin Mammiri RT 001 RW 006, Kota Makassar Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar	diakomodir
4	Masyarakat meminta kepada anggota DPRD Kota Makassar untuk mengadakan pelatihan UMKM untuk Ibu-ibu	ERIC HORAS, SE, MM (Fraksi Partai Gerindra)	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jl. Gunung Merapi Selatan (Samping Toko Tiens) TR001 RW 006 Kel. Maricaya baru Kec. Makassar, Kota Makassar	diakomodir
5	Meminta kepada pemerintah agar infrastruktur di wilayah kami agar di adakan peremjaan	FASRUDDIN RUSLY, SE (Fraksi PPP)	Penyediaan Infrastruktur	Jl. Gajah No.6, Kota Makassar Kel. Maricaya Baru Kec. Makassar	bukan tupoksi dinas pariwisata

6	Pelatihan Ekonomi Kreatif	H. SAHRUDDIN SAID, SE (Fraksi P A N)	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Mangara bombang Kel. Tallo, Kec. Tallo Kota Makassar	diakomodir
7	Pemberdayaan Masyarakat dengan adanya kursus keterampilan yang ditujukan untuk kaum-kamu muda serta masyarakat korban pemecatan akibat pandemi corona yang berkepanjangan	Ir. HJ. NURUL HIDAYAT (Fraksi Partai Golkar)	Pelatihan Pengembangan Keterampilan Ekonomi Kreatif	Jl. Cendrawasih IV No. 27 RT.004 RW.004 Kel. Lette Kec. Mariso, Kota Makassar	diakomodir
8	Warga juga berharap dapat didatangkan atau setidaknya diberikan akses untuk pelatihan – pelatihan produktif khususnya bagi warga terdampak covid-19	Ir. HJ. NURUL HIDAYAT (Fraksi Partai Golkar)	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jl. Jl.cendrawasih 5 no.8 Kel. Jongaya Kec. Tamalate, Kota Makassar	diakomodir
9	Disamping itu warga juga menginginkan akses dalam mendapatkan bantuan dana untuk melatih masyarakat supaya dapat berproduksi dan mempunyai keterampilan yang bernilai ekonomis	Ir. HJ. NURUL HIDAYAT (Fraksi Partai Golkar)	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jl.Dg.Tata Kompleks Hartaco Indah Kel.Parang Tambung Kec.Tamalate, Kota Makassar	diakomodir
10	Perbaikan Infrastruktur yakni perbaikan drainase dan jalan lingkungan	M. ARIFIN DG. KULLE, SE (Fraksi Partai Demokrat)	Penyediaan Infrastruktur	RT.008/RW.003, Kel. Parang Kec. Mamajang Kota Makassar	bukan tupoksi dinas pariwisata
11	Perbaikan infrastruktur yakni perbaikan drainase dan jalan lingkungan	M. ARIFIN DG. KULLE, SE (Fraksi Partai Demokrat)	Penyediaan Infrastruktur	RT.0003/RW.003, Kel. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar	bukan tupoksi dinas pariwisata
12	Perbaikan infrastruktur yakni perbaikan drainase dan jalan lingkungan	M. ARIFIN DG. KULLE, SE (Fraksi Partai Demokrat)	Penyediaan Infrastruktur	RT.0001/RW.004, Kel. Kampung Buyang Kec. Mariso Kota Makassar	bukan tupoksi dinas pariwisata
13	Mengharapkan perbaikan infrastruktur yakni jalan lingkungan	M. ARIFIN DG. KULLE, SE (Fraksi Partai Demokrat)	Penyediaan Infrastruktur	RT.002/RW.004, Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar	bukan tupoksi dinas pariwisata
14	Perbaikan infrastruktur yakni perbaikan drainase dan jalan lingkungan	M. ARIFIN DG. KULLE, SE (Fraksi Partai Demokrat)	Penyediaan Infrastruktur	RT.001/RW.010, Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar	bukan tupoksi dinas pariwisata
15	Perbaikan infrastruktur yakni perbaikan drainase dan jalan lingkungan	M. ARIFIN DG. KULLE, SE (Fraksi Partai Demokrat)	Penyediaan Infrastruktur	RT.004/RW.003, Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar	bukan tupoksi dinas pariwisata

**Usulan Masyarakat**

No	Pengusul	Usulan	Permasalahan	Alamat	Rekomendasi SKPD
1	BURHANUDDIN, SE (KELURAHAN BARAYA)	Pengembangan Lorong Wisata	Pembinaan/Pembenahan Lorong Wisata Melati Dengan Rincian Anggaran Rp. 30.000.000	JL. KANDEA 2 LR. 106 RT. 001 RW. 002, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000
2	BURHANUDDIN, SE (KELURAHAN BARAYA)	Pengembangan Lorong Wisata	Pembinaan / Pembentukan Lorong Wisata dengan Rincian Anggaran Rp. 30.000.000	JL. KANDEA 003 LR. 002 RT. 003 RW. 003 KEL. BARAYA, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000
3	Hj. Andi Haslindah, SE.,M.Si (KELURAHAN SINRIJALA)	Pengembangan Lorong Wisata	Kurangnya penataan dan minimnya sarana lorong wisata dalam mendukung pariwisata di kelurahan sinrijala sebanyak 1 lorong, anggaran sebesar Rp. 30.000.000	Jl. samping Unibos, Kanal RW 04, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000
4	Azis Adam Musa, SE (KELURAHAN PANAİKANG)	Pengembangan Lorong Wisata	Terbatasnya sarana dan prasarana untuk mendukung program lorong wisata khususnya dalam pengadaan Rak Bunga/ Tanaman di Lorong wisata di Kel. Panaikang Jumlah Anggaran RP. 30.000.000,-	Kelurahan Panaikang, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000
5	Nurul Oktavia Putri, S.IP.,M.Si (KELURAHAN PANDANG)	Pengembangan Lorong Wisata	Keberadaan lorong yang belum tertata sehingga memerlukan penataan dengan volume 1 paket dan Anggaran sebesar Rp. 30.000.000 agar dapat mempunyai daya tarik tersendiri dan menjadi tujuan wisata.	Kelurahan Pandang, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000
6	Zamhir Islami Rahman, S.STP (KELURAHAN MASALE)	Pengembangan Lorong Wisata	pengeembangan lorong wisata jl adhyaksa lorong 4 anggaran 30.000.000	jl adhyaksa lorong 4, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000
7	Andi Supriadi.S, S.STP., M.Adm.KP (KELURAHAN KARAMPUANG)	Pengembangan Lorong Wisata	Butuh pembenahan lorong wisata seperti pengecatan lorong, pot bunga/tanaman porang di sepanjang lorong - Vol. 1 Paket - Pagu anggaran Rp. 30.000.000	Jl. Racing Centre Lr.1 Rt.002/Rw.002, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000

8	DRA. A. SITTI JUHAEDAH, MM (KELURAHAN BONTO BIRAENG)	Pengembangan Lorong Wisata	(usulan baru) kurangnya objek wisata ditengah kota dalam meningkatkan ekonomi masyarakat maka perlu melakukan kegiatan Pengembangan Lorong Wisata. Volume 2 Paket dengan anggaran Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)	Jl. Onta lama 4 RT 05 RW 01, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 2 0 Anggaran : 60000000
9	HARIANTO, S.Sos . MM (KELURAHAN PATTINGALLOANG BARU)	Pengembangan Lorong Wisata	Pengembangan Lorong Biasa menjadi lorong wisata. Pagu Usulan Rp. 15.000.000,-	Jalan Sabutung Timur Lr. 2 Kelurahan Patingalloang Baru, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 15000000
10	DYOHARIAH, SH (KELURAHAN LABUANG BAJI)	Pengembangan Lorong Wisata	Penataan Lorong Wisata Jalan Kancil Selatan Lorong I ORW 1 dengan Perkiraan Volume 1 titik Perkiraan Anggaran 30.000.000	Jalan Kancil Selatan Lorong 1 ORW I Kelurahan Labuang baji Kecamatan Mamajang, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000
11	DYOHARIAH, SH (KELURAHAN LABUANG BAJI)	Pengembangan Lorong Wisata	Penataan Lorong Wisata Jalan Tupai V dengan Perkiraan Volume 1 titik dan Perkiraan Anggaran 30.000.000	Jalan Tupai V Kelurahan labuang Baji Kecamatan Mamajang, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000
12	DYOHARIAH, SH (KELURAHAN LABUANG BAJI)	Pengembangan Lorong Wisata	Penataan Lorong Wisata Jalan Macan II dengan Perkiraan Volume 1 titik dan Perkiraan Anggaran 30.000.000	Jalan Macan II ORW 2 Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000
13	DYOHARIAH, SH (KELURAHAN LABUANG BAJI)	Pengembangan Lorong Wisata	Penataan Lorong Wisata Jalan Landak I dengan Perkiraan Volume 1 titik dan Perkiraan Anggaran 30.000.000	Jalan Landak I ORW 1 Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000
14	DRA. A. SITTI JUHAEDAH, MM (KELURAHAN BONTO BIRAENG)	Pengembangan Lorong Wisata	(usulan baru) kurangnya objek wisata ditengah kota dalam meningkatkan ekonomi masyarakat maka perlu melakukan kegiatan Pengembangan Lorong Wisata. Volume 2 Paket dengan anggaran Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)	Macan 1 RT 06 RW 02, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 2 0 Anggaran : 60000000

15	DRA. A. SITTI JUHAEDAH, MM (KELURAHAN BONTO BIRAENG)	Pengembangan Lorong Wisata	(usulan baru) kurangnya objek wisata ditengah kota dalam meningkatkan ekonomi masyarakat maka perlu melakukan kegiatan Pengembangan Lorong Wisata. Volume 2 Paket dengan anggaran Rp.60.000.000,- (Enam Puluh Juta Rupiah)	Jl. Singa 1 RT 04 RW 03, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 2 0 Anggaran : 60000000
16	NASAR AFFANDI HAMSAR, S. Sos (KELURAHAN MALIMONGAN TUA)	Pengembangan Lorong Wisata	sesuai Program Walikota Makassar maka diusulkan lorong tersebut diusulkan menjadi Lorong Wisata 1 Kegiatan perkiraan Anggaran senilai Rp. 30.000.000	Jl. Dakwah I RT. 001, RT. 002/ RW. 005, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000
17	NASAR AFFANDI HAMSAR, S. Sos (KELURAHAN MALIMONGAN TUA)	Pelatihan Pengembangan Keterampilan Ekonomi Kreatif	untuk meningkatkan Skill dan sumber daya manusia bagi warga yang tidak memiliki kegiatan sebanyak 25 Orang x Rp. 250.000 perkiraan Anggaran senilai Rp. 6.250.000	RW. 001, RW. 002, RW. 004, RW. 005, RW. 006 Jl. Salemo No. 60, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 25 0 Anggaran : 25000000
18	ANDHY RICHARD ANDREAS. S.Psi (KELURAHAN MELAYU BARU)	Pengembangan Lorong Wisata	Pengembangan lorong Pendidikan dan kuliner Lr. 218 Pengembangan lorong garden dan UMKM Lr. 206 Pengembangan lorong kuliner Lr. 220	Jl. Sangir Lr.218 dan Jl. Sangir Lr.206 dan Jl. Sangir Lr. 220, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 2 0 Anggaran : 30000000
19	ANDI ZULKARNAIN, ST (KELURAHAN MALIMONGAN)	Pengembangan Lorong Wisata	Unuk mendukung Program Walikota Makassar untuk Pengembangan lorong wisata kelurahan malimongan estimasi anggaran Rp. 30.000.000	Kelurahan Malimongan, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000
20	LUKMAN, S.Sos, MM (KELURAHAN PATTUNUANG)	Pengembangan Lorong Wisata	Pengembangan lorong wisata kuliner, lorong wisata UMKM dan lorong garden yang tersebar di 2 lorong kelurahan pattunuang Anggaran 60.000.000	RW 1 dan RW 2 Kelurahan Pattunuang, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 2 0 Anggaran : 60000000
21	AIDIR PERDANA P., S.STP (KELURAHAN MALOKU)	Pengembangan Lorong Wisata	menjadikan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata ke dalam lorong - lorong Volume 1 Paket Rp. 30.000.000	Jl. Somba Opu Lr 293 (RW.02 RT.04), Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000
22	AIDIR PERDANA P., S.STP (KELURAHAN MALOKU)	Pengembangan Lorong Wisata	Menjadikan adaya peningkatan daya tarik wisata kelorong - lorong Volume 1 Paket ( Rp. 30.000.000)	Jl. Somba Opu Lr.282 & 286 RW. 01, Kota Makassar	Rekomendasi : Usulan disetujui karena sesuai dengan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen perencanaan Dinas Pariwisata Koefisien : 1 0 Anggaran : 30000000

Berdasarkan tabel 2.4 dapat diketahui bahwa kegiatan yang diusulkan di Musrenbang tahun 2022 untuk dilaksanakan di tahun 2023 terdiri atas dua kategori yakni berdasarkan Pokir (Reses) dan usulan Masyarakat. Dari kedua kategori tersebut, untuk Pokir (Reses) ada yang dapat diakomodir dan ada yang tidak dapat diakomodir sementara untuk usulan masyarakat semuanya dapat diakomodir. Adapapun usulan yang dapat diakomodir adalah;

**Pokir (Reses) :**

1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan alamat Baruga BTN Bumi Bung Permai RT 06 RW 07 Kel. Tamalanrea Jaya, Kec. Tamalanrea Kota Makassar.
2. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota dengan alamat Pantai Angin Mammiri RT 001 RW 006, Kota Makassar Kel. Tanjung Merdeka Kec. Tamalate Kota Makassar.
3. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dengan alamat Jl. Gunung Merapi Selatan (Samping Toko Tiens) TR001 RW 006 Kel. Maricaya baru Kec. Makassar, Kota Makassar
4. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dengan alamat Mangara bombang Kel. Tallo, Kec. Tallo Kota Makassar
5. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dengan alamat Jl. Cendrawasih IV No. 27 RT.004 RW.004 Kel. Lette Kec. Mariso, Kota Makassar
6. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dengan alamat Jl. Jl.cendrawasih 5 no.8 Kel. Jongaya Kec. Tamalate, Kota Makassar
7. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif dengan alamat Jl.Dg.Tata Kompleks Hartaco Indah Kel.Parang Tambung Kec.Tamalate, Kota Makassar

**Usulan Masyarakat :**

1. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat JL. KANDEA 2 LR. 106 RT. 001 RW. 002, Kota Makassar
2. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat JL. KANDEA 003 LR. 002 RT. 003 RW. 003 KEL. BARAYA, Kota Makassar
3. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Jl. samping Unibos, Kanal RW 04, Kota Makassar

4. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Kelurahan Panaikang, Kota Makassar
5. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Kelurahan Pandang, Kota Makassar
6. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Jl adhyaksa lorong 4, Kota Makassar
7. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Jl. Racing Centre Lr.1 Rt.002/Rw.002, Kota Makassar
8. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Jl. Onta lama 4 RT 05 RW 01, Kota Makassar
9. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Jalan Sabutung Timur Lr. 2 Kelurahan Pattingalloang Baru, Kota Makassar
10. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Jalan Kancil Selatan Lorong 1 ORW I Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
11. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Jalan Tupai V Kelurahan labuang Baji Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
12. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Jalan Macan II ORW 2 Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
13. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Jalan Landak I ORW 1 Kelurahan Labuang Baji Kecamatan Mamajang, Kota Makassar
14. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Macan 1 RT 06 RW 02, Kota Makassar
15. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Jl. Singa 1 RT 04 RW 03, Kota Makassar
16. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Jl. Dakwah I RT. 001, RT. 002/ RW. 005, Kota Makassar
17. Pelatihan Pengembangan Keterampilan Ekonomi Kreatif dengan alamat RW. 001, RW. 002, RW. 004, RW. 005, RW. 006 Jl. Salemo No. 60, Kota Makassar
18. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Jl. Sangir Lr.218 dan Jl. Sangir Lr.206

19. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Kelurahan Malimongan, Kota Makassar
20. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat RW 1 dan RW 2 Kelurahan Pattunuang, Kota Makassar
21. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Jl. Somba Opu Lr 293 (RW.02 RT.04), Kota Makassar
22. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota (Pengembangan Lorong Wisata) dengan alamat Jl. Somba Opu Lr.282 & 286 RW. 01, Kota Makassar

Usulan yang tidak dapat diakomodir adalah sebagai berikut;

**Pokir (Reses) :**

1. Pengembangan Pendidikan dengan alamat BTN Mangga Tiga RT 003 / RW 007 Kel. Paccerrakang Kec. Biringkanaya, Kota Makassar. Usulan ditolak karena usulan masalah tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata Kota Makassar
2. Penyediaan Infrastruktur dengan alamat Jl. Gajah No.6, Kota Makassar Kel. Maricaya Baru Kec. Makassar. Usulan ditolak karena usulan masalah tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata Kota Makassar
3. Penyediaan Infrastruktur dengan alamat RT.008/RW.003, Kel. Parang Kec. Mamajang Kota Makassar . Usulan ditolak karena usulan masalah tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata Kota Makassar
4. Penyediaan Infrastruktur dengan alamat RT.0003/RW.003, Kel. Bontorannu Kec. Mariso Kota Makassar. Usulan ditolak karena usulan masalah tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata Kota Makassar
5. Penyediaan Infrastruktur dengan alamat RT.0001/RW.004, Kel. Kampung Buyang Kec. Mariso Kota Makassar. Usulan ditolak karena usulan masalah tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata Kota Makassar
6. Penyediaan Infrastruktur dengan alamat RT.002/RW.004, Kel. Jongaya Kec. Tamalate Kota Makassar. Usulan ditolak karena usulan masalah tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata Kota Makassar
7. Penyediaan Infrastruktur dengan alamat RT.001/RW.010, Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar. Usulan ditolak karena usulan masalah tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata Kota Makassar
8. Penyediaan Infrastruktur dengan alamat RT.004/RW.003, Kel. Mannuruki Kec. Tamalate Kota Makassar. Usulan ditolak karena usulan masalah tidak sesuai dengan tupoksi Dinas Pariwisata Kota Makassar

Sementara itu, berdasarkan pengendalian hasil musrenbang tahun 2021 yang pelaksanaan kegiatannya di tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.5 di bawah ini.

**Tabel 2.5**  
**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021**  
**Pelaksanaan Kegiatan di Tahun 2022**  
**Kota Makassar**

Nama SKPD : Dinas Pariwisata Kota Makassar

NO	PERMASALAHAN	USULAN	ALAMAT	KOEFISIEN	ALASAN
<b>POKIR</b>					
1	Warga An. Husain mengeluhkan terkait masalah pendidikan yang perlu perhatian dari Dinas terkait	Pengembangan pendidikan	Jl. Mannuruki 2 RT. 02 RW. 09 Kelurahan Mangasa Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Tamalate, Mangasa	1 Lokasi	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Pendidikan
2	Sistem Zonasi SMA yang dilakukan banyak merugikan warga Tambasa karena Tambasa tidak masuk Zonasi	Pengembangan pendidikan	Jl. Tambasa 2 No. 16, Kota Makassar, Tamalanrea, Tamalanrea Jaya	1 Lokasi	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Pendidikan
3	Terkait dengan permintaan nelayan agar diberikan bantuan berupa alat tangkap hasil laut	Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	Pulau Lae-Lae RW.01/RT. 01 Depan Kantor PLN Lae-Lae Kel. Lae-Lae Kec. Ujung Pandang, Kota Makassar, Ujung Pandang, Lae-Lae	1 Lokasi	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2D)
4	UKM yang banyak di sekitar jalan Rajawali, berharap dapat bantuan untuk terus bisa berusaha di masa pandemi ini	Fasilitasi pendanaan dan pembiayaan	Jl. Rajawali Lr. 10 Kel. Lette Kec. Mariso, Kota Makassar, Mariso, Lette	1 Kelompok	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Koperasi
<b>MASYARAKAT</b>					
1	Renovasi Sanggar Seni	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jl. Rappocini Raya Lr. 3, Kota Makassar, Rappocini	20 Meter <sup>2</sup>	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas Kebudayaan
2	Pengadaan Lampu Jalan, Jalan tersebut gelap/rawan sering terjadi perang kelompok	Penyediaan Infrastruktur	Jl. Inspeksi Kanal Kerung-Kerung (RT. 010, RW 003/RT 011 RW 004) Kota Makassar	10 Titik	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Pengadaan lampu lorong dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU)
3	Banyaknya anak yang putus sekolah membutuhkan ijazah (Paket A & Paket C)	Pengembangan pendidikan	Kelurahan Bungeajaya, Kota Makassar	40 Orang	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Usulan SKPD yakni Dinas pendidikan
4	Pelatihan Kuliner untuk menopang kehidupan keluarga	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jalan Ade Irma Nasution RW 02, Kota Makassar, Tallo, Wala-Walaya	1 Kegiatan	Usulan Diterima, sub kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Bidang Pengembangan SDM Pariwisata)

NO	PERMASALAHAN	USULAN	ALAMAT	KOEFISIEN	ALASAN
5	Pelatihan Guide karena daerah wisata yang banyak dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun mancanegara	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi masyarakat	Kelurahan Gusung, Kota Makassar, Ujung Tanah, Gusung	15 Orang	Usulan Diterima, sub kegiatan Pengembangan kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar (Bidang Pengembangan SDM Pariwisata)
6	Pelatihan Tata Rias (Salon), Pelatihan Service AC, dan Pelatihan Service Handphone	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jl. Belibis RW. 004, Kota Makassar, Mariso, Kec. Mariso	240 Peserta	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Pelatihan penata rias, pelatihan service AC, dan pelatihan service handphone sesuai dengan tupoksi Dinas Tenaga Kerja / Dinas Perdagangan
7	Lampu Lorong dapat menambah keindahan lingkungan dan meningkatkan keamanan	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jl. Cendrawasih Lorong 15 RT 02/03 RW 04, Kota Makassar, Mamajang, Karang Anyar	24 Titik	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Pengadaan lampu lorong dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU)
8	Pembangunan Dermaga Sengka Batu merupakan akses menuju kelurahan Lakkang serta wisata bahari dan bisnis perikanan bagi pesisir Sangka Batu dan Tallo	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jalan Teuku Umar 15 RT 003 RW 005, Kota Makassar, Tallo, Buloa	250 M2	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, pembangunan dermaga (fisik) untuk bisnis perikanan bagi pesisir dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU)
9	Pelatihan Kuliner	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	RW 01 RW 02, RW 03 dan RW 04 Kota Makassar, Tallo, La'Latang	50 Orang	Usulan Diterima, sub kegiatan Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata (Bidang Pengembangan SDM Pariwisata)
10	Pengadaan Lampu Lorong	Penyediaan Infrastruktur	RW 01 (82 titik) RW 02 (36 titik), Kota Makassar, Tallo, La'Latang	118 Titik	Usulan ditolak/Tidak diterima karena tidak sesuai dengan sasaran/TUPOKSI Dinas Pariwisata, Pengadaan lampu lorong dialihkan ke Dinas Pekerjaan Umum (PU)

Berdasarkan tabel 2.4, kegiatan pemangku jabatan yang diakomodir belum dilaksanakan karena jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di triwulan III dan IV tahun 2022.

**BAB III**  
**TUJUAN DAN SASARAN DINAS PARIWISATA**

**3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Secara umum sasaran kementerian sudah tertuang dalam program dan kegiatan yang ada di Dinas Pariwisata. Faktor–faktor penghambat dan faktor–faktor pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra K/L dapat dilihat pada tabel 3.1.

**Tabel 3.1**  
**Telaahan terhadap Sasaran Renstra Kementerian Pariwisata dan Badan Ekonomi Kreatif**

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
1.	Meningkatnya kontribusi pariwisata dan ekonomi kreatif terhadap ketahanan ekonomi	Tingkat persentase kontribusi pariwisata terhadap total PDRB masih rendah, bahkan mengalami penurunan sebesar 0,38% di tahun 2020
2.	Meningkatnya nilai tambah ekonomi kreatif nasional	
3.	Meningkatnya kualitas dan jumlah wisatawan	Masih meningkatnya kasus COVID-19 di Kota Makassar akan berdampak pada jumlah kunjungan wisatawan
4.	Meningkatnya daya saing destinasi dan industri pariwisata nasional	Masih rendahnya fasilitas penunjang/amenitas pariwisata yang terbangun
5.	Tersedianya produk pariwisata sesuai kebutuhan	
6.	Bertumbuhnya investasi dan akses pembiayaan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional	Fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif yang belum optimal
7.	Terlindunginya kekayaan intelektual bidang pariwisata dan ekonomi kreatif	
8.	Terselenggaranya regulasi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis kajian	Belum tersedianya produk hukum terkait bidang kepariwisataan (RIPPARDA Kota Makassar)
9.	Tersedianya data dan informasi hasil kajian sesuai kebutuhan pariwisata dan ekonomi kreatif	Lemahnya data dan analisa serta kajian terkait kepariwisataan yang dilakukan oleh bidang teknis terkait
10.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas SDM kepariwisataan dan ekonomi kreatif	Jumlah tenaga kerja sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang tersertifikasi masih minim

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 ditetapkan berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun 2021 dan capaian kinerja dalam RPJMD Kota Makassar 2021-2026, Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025, sesuai petunjuk Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/6802/Bangda tanggal 16 Desember 2019, perihal Penyusunan RKPD Tahun 2023 Kota Makassar.

Penyusunan RKPD Kota Makassar tahun 2023 juga berpedoman pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM), Permendagri 100 tentang penerapan SPM dan mengacu pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019. Sedangkan untuk sistematika dan tata cara penyusunan RKPD Kota Makassar Tahun 2021 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal tersebut, maka dapat dirumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 dengan berfokus pada misi 1, 2, dan 3 yakni :

1. Revolusi Sumber Daya Manusia (SDM) dan Percepatan Reformasi Birokrasi Menuju SDM Kota yang Unggul dengan Pelayanan Publik Kelas Dunia Bersih dari Indikasi Korupsi;
2. Rekonstruksi Kesehatan, Ekonomi, Sosial dan Budaya Menuju Masyarakat Sejahtera dengan Imunitas Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kesehatan Kota yang Kuat untuk Semua;
3. Restorasi Ruang Kota yang Inklusif menuju Kota Nyaman Kelas Dunia yang “*Sombere’ dan smart*” city untuk Semua

Berdasarkan hasil analisis terhadap hal-hal tersebut, maka dapat dirumuskan Tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2023 dengan berfokus pada ketiga misi tersebut sehingga arah kebijakan yang berfokus pada tujuan :

- 1) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) (1.1);
- 2) Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Secara Merata (2.2);
- 3) Mewujudkan Makassar menjadi “Livable City” dan “Resilient City” (3.1).

Melalui tujuan ini, Pembangunan Makassar diarahkan untuk dapat memberdayakan kualitas sumber daya manusia, kekuatan ekonomi masyarakat dan menguatkan daya saing ekonomi kota dengan berfokus pada sasaran :

1. Meningkatnya Aksesibilitas dan Kualitas Pendidikan (1.1.1);
2. Terwujudnya Gerakan Masyarakat Memperkuat ketahanan Ekonomi (2.2.2);
3. Tersedianya Infrastruktur Kota Menuju Kota Nyaman (3.1.1).

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pariwisata Kota Makassar mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rumusan kebijaksanaan teknis di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- b. Penyusunan rencana dan program di bidang promosi Pariwisata;
- c. Penyusunan rencana dan program penyelenggaraan kegiatan pasar wisata daerah;
- d. Penyusunan rencana dan program pengembangan sumber daya dan peran serta masyarakat;
- e. Pelaksanaan pengendalian dan pengawasan terhadap perkembangan usaha industri kepariwisataan;

### 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pariwisata Kota Makassar

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi suatu organisasi, yaitu sesuatu (apa) yang akan dicapai atau apa yang akan dihasilkan dalam jangka waktu suatu perencanaan. Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2023 adalah **Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap Struktur Ekonomi Daerah**.

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Adapun sasaran yang akan dicapai, serta hubungannya dengan tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Daya Tarik Wisata;
2. Meningkatnya Daya Saing Wisata; dan
3. Meningkatnya Pendapatan Daerah.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.3

**Tabel 3.3**

**Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata**

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun 2023
1	Meningkatkan Peran Sektor Pariwisata terhadap Struktur Ekonomi Daerah	Kontribusi Pariwisata terhadap Total PDRB (%)			1,26%
			Meningkatnya Daya Tarik Wisata	Persentase pertumbuhan kunjungan wisatawan	6,45 %
			Meningkatnya Daya Saing Wisata	Lama tinggal wisatawan	3,25 Hari
			Meningkatnya Pendapatan Daerah Sektor Pariwisata	Persentase PAD dari sektor pariwisata	19,83 %

**BAB IV****RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PARIWISATA****4.1 Program, Kegiatan, dan Pendanaan Dinas Pariwisata**

Berdasarkan Tujuan, Sasaran, maka disusunlah program-program Dinas Pariwisata untuk Tahun 2023 sesuai dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target sasaran yang harus tercapai pada tahun 2023 dan berdasarkan isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Pariwisata. Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti pada lampiran 3.

Program dan Kegiatan yang ditetapkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kota Makassar Tahun 2023 sebagai penjabaran dari Rencana Kerja yang telah disempurnakan menjadi Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 Pemerintah Kota Makassar yang disusun dengan memperhatikan kondisi strategis lingkup organisasi Pemerintah Kota Makassar.

Program dan kegiatan dijabarkan sesuai arah kebijakan pokok Pemerintah Kota Makassar yang berfokus pada kebijakan pengembangan kawasan, tata ruang dan lingkungan dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

**Program Utama**

Program Dinas Pariwisata Kota Makassar yang terkait dengan Program Utama terdiri dari :

- **Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, dilakukan dengan kegiatan indikatif antara lain :**
  1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
    - a. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
  2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan;
    - a. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
    - b. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
    - c. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
  3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota;
    - a. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
    - b. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
    - c. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi
    - d. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
    - e. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
  4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan;
    - a. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
    - b. Pembinaan dan Pengawasan Usaha Pariwisata
    - c. Fasilitas Standarisasi Industri dan Usaha Pariwisata
  
- **Program Pemasaran Pariwisata, dilakukan dengan kegiatan :**
  1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
    - a. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri

- b. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
  - c. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri
  - d. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri
- **Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, dilakukan dengan kegiatan indikatif antara lain :**
1. Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi, dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota dengan sub kegiatan :
    - a. Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif
  2. Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif, dengan sub kegiatan :
    - a. Pengembangan Riset
    - b. Pengembangan Pendidikan
    - c. Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan
    - d. Penyediaan Infrastruktur
    - e. Pengembangan Sistem Pemasaran
    - f. Pemberian Insentif
    - g. Fasilitasi Kekayaan Intelektual
    - h. Perlindungan Hasil Kreativitas
    - i. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif
- **Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dilakukan dengan kegiatan indikatif antara lain :**
1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar, dengan sub kegiatan :
    - a. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
    - b. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata

- c. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/Siswa)
  - d. Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
  - e. Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif
  - f. Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif
  - g. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
2. Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif, dengan sub kegiatan :
    - a. Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif

#### **Program Pendukung**

- **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan indikatif antara lain :**
  1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
    - b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
    - c. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
    - d. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
    - e. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
    - f. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasi Kinerja SKPD
    - g. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
  2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
    - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
    - b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
    - c. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
    - d. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
    - e. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
    - f. Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

- g. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
      - h. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran
2. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
  - b. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD
  - c. Rekonsiliasi Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan:
  - a. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
  - b. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
  - b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
  - c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
  - d. Penyediaan bahan Logistik Kantor
  - e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
  - f. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
  - g. Fasilitasi Kunjungan Tamu
  - h. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Pengadaan Mebel
  - c. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  - c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan sub kegiatan :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
  - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  - c. Pemeliharaan Mebel
  - d. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  - e. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Untuk dapat memahami jenis dan pilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang diajukan untuk ditampung dalam R-APBD Tahun Anggaran 2023, maka seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dapat dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2023 dapat diuraikan pada lampiran 3;

Berdasarkan lampiran 3, dapat diketahui bahwa total pagu yang dianggarkan pada Renja Tahun 2023 sebesar Rp. 48.284.094.495,- yang terdiri atas 4 program utama dan 1 program pendukung. Program utama terdiri dari 7 kegiatan dengan 18 sub kegiatan dan program pendukung terdiri atas 7 kegiatan dengan 27 sub kegiatan.

## BAB IV

### PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kota Makassar merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan pengelolaan pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022. Rencana kerja ini disusun dengan berpedoman pada RPJP 2020-2025, RPJMD 2021-2026, RKPD 2023, dan SDGs Kota Makassar dan berdasarkan pada Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Rencana kerja ini terkait dengan kebijakan pokok RPJMD 2021-2026 dan RKPD 2023 yang arah kebijakannya berfokus pada Peningkatan Peran Sektor Pariwisata terhadap Struktur Ekonomi Daerah, Kebijakan ini kemudian dijabarkan oleh Dinas Pariwisata Kota Makassar ke dalam Program dan Kegiatan Tahun 2023.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Tahun 2023, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi OPD diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan berkelanjutan, serta mendukung visi dan misi Kepala Daerah Kota Makassar.

Program dan kegiatan indikatif yang tercantum dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 akan dibiayai dengan sumber dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Makassar oleh karena itu komitmen pimpinan dan segenap staf Dinas Pariwisata Kota Makassar harus didukung oleh segenap aparatur daerah dan legislatif serta dukungan partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan di dalam mengimplementasikan Rencana Kerja ini.

Semoga rencana yang ditetapkan dalam Rencana Kerja ini dapat dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2023 mendatang.

**FORMULIR E.81**  
**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kota Makassar**  
**Renja Perangkat Daerah Dinas Pariwisata Kota Makassar**  
**Periode Pelaksanaan : Tahun 2021**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPd :

NO	KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	SATUAN KINERJA	TARGET RKPd TAHUN 2021		TARGET RENJA (DPA PERUBAHAN) TAHUN 2021		REALISASI KINERJA TRIWULAN						REALISASI CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD YANG DI EVALUASI (2021)		TINGKAT CAPAIAN KINERJA DAN REALISASI ANGGARAN RENJA TAHUN 2021 (%)		SKPD PENANGGUNG JAWAB	KET				
					Target	Rp.	Target	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			K	Rp.		
		URUSAN PILIHAN																						
		Pariwisata																						
		Dinas Pariwisata																						
3	3.26	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kepuasan ASN Perangkat Daerah terhadap pelayanan kesekretariatan (kepegawaian, perlengkapan dan keuangan)	%	90%			25%		20%		20%		25%		90%		100%					
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	%	90%	10,270,218,100	9,252,147,039	25%	1,694,075,404	20%	3,149,321,170	20%	1,707,573,971	25%	2,349,728,809	90%	8,900,699,354	100%	86.67	DISPAR	Indikator program dicapai di akhir tahun		
				Meningkatnya persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Dinas Pariwisata	%	100%			25%		25%		25%		6%		80.58%		81%					
				Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	%	90%			25%		20%		20%		25%		90%		100%					
3	3.26	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Dokumen	10	115,715,000	115,715,000	1	5,000,000	1	48,580,000	0	62,135,000	2	115,715,000	20.00	100.00					
				01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihadirkan	Dokumen	3	53,990,000	53,990,000	1	5,000,000	1	48,580,000		410,000	3	53,990,000	100.00	100.00				
				02	Korodnasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Dihadirkan	Dokumen	1	7,050,000	7,050,000						7,050,000	1	7,050,000	100.00	100.00				
				03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Disusun	Dokumen	1	6,950,000	6,950,000						6,950,000	1	6,950,000	100.00	100.00				
				04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Dihadirkan	Dokumen	1	6,700,000	6,700,000						6,700,000	1	6,700,000	100.00	100.00				
				05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Prubahan DPA yang Disusun	Dokumen	1	6,725,000	6,725,000						6,725,000	1	6,725,000	100.00	100.00				
				06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang Dihadirkan	Dokumen	3	20,580,000	20,580,000						20,580,000	3	20,580,000	100.00	100.00				
				07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Dihadirkan	Dokumen	2	13,720,000	13,720,000						13,720,000	2	13,720,000	100.00	100.00				
3	3.26	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang disusun	Dokumen	5	8,772,605,400	7,743,193,063		1,560,901,609		2,719,549,256		1,245,429,920		1,956,996,154	0	7,482,876,939	0.00	85.30			
				01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan dalam Setahun	orang	61	8,384,045,400	7,365,153,063	61	1,502,921,609		2,589,189,256		1,151,529,920		1,861,196,154	61	7,104,836,939	100.00	84.74		
				02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang Disediakan	orang	23	316,560,000	306,040,000	21	45,980,000		106,360,000		75,900,000	2	77,800,000	23	306,040,000	100.00	96.68		
				03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah tenaga Administrasi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non PNS) yang Digunakan	orang	6	72,000,000	72,000,000	6	12,000,000		24,000,000		18,000,000		18,000,000	6	72,000,000	100.00	100.00		
3	3.26	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	Jenis	7	351,398,000	431,198,000		27,587,600		97,531,680		156,937,500		144,502,962	0	426,559,742	0.00	121.39			
				01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jenis	7	23,515,000	23,515,000			7	10,606,000		12,909,000			7	23,515,000	100.00	100.00		
				02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan yang disediakan	Jenis	5	42,927,000	87,927,000			5	20,594,000		49,950,000		17,382,000	5	87,926,000	100.00	204.83		
				03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jenis	13	38,584,000	38,584,000			13	19,057,500		19,526,500			13	38,584,000	100.00	100.00		
				04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik yang disediakan	Jenis	1	34,132,000	107,932,000					1	70,132,000		37,800,000	1	107,932,000	100.00	316.22		
				06	Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan yang disediakan	Media	6	12,240,000	12,240,000	6	2,740,000		2,020,000		4,420,000		3,060,000	6	12,240,000	100.00	100.00		

3	3.26	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Kali	17	200,000,000	161,000,000	4	24,847,600	4	45,254,180	0	86,260,962	8	156,362,742	47.06	78.18				
3	3.26	01	2.07		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Tersedia</b>	<b>Jenis</b>	<b>2</b>	<b>50,000,000</b>	<b>50,000,000</b>		<b>0</b>	<b>1</b>	<b>49,025,862</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>49,025,862</b>	<b>50.00</b>	<b>98.05</b>				
3	3.26	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	Unit	1	50,000,000	50,000,000			1	49,025,862	0		1	49,025,862	100.00	98.05				
3	3.26	01	2.08		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Disediakan</b>	<b>Jenis</b>	<b>4</b>	<b>635,221,800</b>	<b>635,221,576</b>	<b>2</b>	<b>100,586,195</b>		<b>176,580,472</b>		<b>141,539,411</b>		<b>154,539,893</b>	<b>2</b>	<b>573,245,971</b>	<b>50.00</b>	<b>90.24</b>		
3	3.26	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat dan ekspedisi yang disediakan	orang	22	437,949,600	437,949,600	21	63,000,000		139,151,816		102,573,392	1	110,200,944	22	414,926,152	100.00	94.74		
3	3.26	01	2.08	02	Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah jasa pelayanan rekening telepon, listrik dan air kantor	Rekening	3	197,272,200	197,271,976	3	37,586,195		37,428,656		38,966,019		44,338,949	3	158,319,819	100.00	80.25		
3	3.26	01	2.09		<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah yang Dipelihara</b>	<b>Jenis</b>	<b>5</b>	<b>345,277,900</b>	<b>276,819,400</b>		<b>0</b>	<b>3</b>	<b>58,053,900</b>		<b>163,667,140</b>		<b>31,554,800</b>	<b>3</b>	<b>253,275,840</b>	<b>60.00</b>	<b>73.35</b>		
3	3.26	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas	Unit	1	28,336,800	28,336,800			1	5,226,200		12,142,200		9,177,800	1	26,546,200	100.00	93.68		
3	3.26	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional dan Lapangan	Jumlah jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional yang disediakan	Unit	25	244,721,100	183,262,600			25	26,302,700		112,829,940		22,377,000	25	161,509,640	100.00	66.00		
3	3.26	01	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah meja dan kursi kerja/rapat yang dipelihara	Buah	20	11,200,000	11,200,000				20	11,200,000			20	11,200,000	100.00	100.00			
3	3.26	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Unit	62	61,020,000	54,020,000			30	26,525,000		31	27,495,000		61	54,020,000	98.39	88.53		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																			<b>97.63</b>	<b>108.78</b>				
<b>Predikat Kinerja</b>																			<b>Sangat Tinggi (ST)</b>	<b>Sangat Tinggi (ST)</b>				
3	3.26	02			<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	<b>Jumlah Daya Tarik Wisata Kota Makassar yang Dikelola</b>	<b>DTW</b>	<b>1</b>	<b>6,242,600,800</b>	<b>8,669,887,900</b>	<b>0.00</b>	<b>216,200,000</b>	<b>0.00</b>	<b>839,181,000</b>	<b>0.00</b>	<b>1,160,421,320</b>	<b>0.00</b>	<b>2,229,719,534</b>	<b>0.00</b>	<b>4,445,521,854</b>	<b>0.00</b>	<b>71.21</b>	<b>DISPAR</b>	<b>Indikator program dicapai di akhir tahun</b>
						<b>Lama Kunjungan Wisata PAD Sektor Pariwisata</b>	<b>Hari</b>	<b>3</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>1</b>		<b>1.40</b>		<b>46.67</b>			
							<b>%</b>	<b>27.12%</b>			<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>0.00</b>		<b>24%</b>		<b>24%</b>		<b>89.49</b>			
3	3.26	02	2.01		Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata Kota Makassar yang Dikelola	DTW	1	2,200,000,000	4,492,942,000		-	1	112,936,000		149,650,000		443,104,500	1	705,690,500	100.00	32.08		
3	3.26	02	2.01	03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah daya tarik wisata Kota Makassar yang dikembangkan	DTW	1	2,200,000,000	4,492,942,000			1	112,936,000		149,650,000		443,104,500	1	705,690,500	100.00	32.08		
3	3.26	02	2.02		<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Makassar yang Dilaksanakan</b>	<b>Kawasan</b>	<b>1</b>	<b>1,400,000,000</b>	<b>1,602,020,000</b>		<b>20,000,000</b>	<b>-</b>	<b>256,411,000</b>		<b>1,200,000</b>		<b>913,696,400</b>	<b>0</b>	<b>1,191,307,400</b>	<b>0.00</b>	<b>85.09</b>		
3	3.26	02	2.02	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis pariwisata Kota Makassar yang dilaksanakan	KSW	12	1,400,000,000	1,602,020,000	12	20,000,000		256,411,000		1,200,000		913,696,400	12	1,191,307,400	100.00	85.09		
3	3.26	02	2.03		<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Sasaran Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kota Makassar yang Diadakan dan Mendapat Pemeliharaan</b>	<b>Prasarana</b>	<b>1</b>	<b>2,336,207,800</b>	<b>2,286,637,900</b>		<b>190,600,000</b>	<b>-</b>	<b>374,966,000</b>		<b>922,421,320</b>		<b>785,848,634</b>	<b>0</b>	<b>2,273,835,954</b>	<b>0.00</b>	<b>97.33</b>		
3	3.26	02	2.03	04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana dalam pengelolaan kawasan wisata strategis pariwisata Kota Makassar yang diadakan dan mendapat pemeliharaan	Bulan	12	1,473,632,800	1,424,062,900	3	190,600,000		373,766,000	3	547,066,320	3	304,308,634	12	1,415,740,954	100.00	96.07		
3	3.26	02	2.03	06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah pengelolaan destinasi pariwisata Kota Makassar dengan memberdayakan masyarakat	KSW	12	862,575,000	862,575,000				1,200,000	12	375,355,000		481,540,000	12	858,095,000	100.00	99.48		
3	3.26	02	2.04		<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah Layanan Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kota Makassar yang Disediakan</b>	<b>Jenis TDUP</b>	<b>13</b>	<b>306,393,000</b>	<b>288,288,000</b>	<b>-</b>	<b>5,600,000</b>	<b>-</b>	<b>94,868,000</b>		<b>87,150,000</b>		<b>87,070,000</b>	<b>0</b>	<b>274,688,000</b>	<b>0.00</b>	<b>89.65</b>		
3	3.26	02	2.04	01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kota Makassar yang disediakan	Usaha	1,000	306,393,000	288,288,000		5,600,000	30	94,868,000	37	87,150,000	35	87,070,000	102	274,688,000	10.20	89.65		
<b>Rata-rata capaian kinerja (%)</b>																			<b>82.04</b>	<b>80.47</b>				
<b>Predikat Kinerja</b>																			<b>Tinggi (T)</b>	<b>Sedang (S)</b>				
3	3.26	03			<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	<b>Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara</b>	<b>Wisnus</b>	<b>925,147</b>			<b>376,574</b>		<b>409,090</b>		<b>243,388</b>		<b>666,131</b>		<b>1,695,183</b>		<b>183.23</b>		<b>Indikator</b>	

										Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara	Wisman	18,484	5,852,545,600		3,444,585,600	997	60,000,000	1,755	529,393,399	440	1,162,287,764	175	1,109,362,858	3,367	2,861,044,021	18.22	48.89	DISPAR	Indikator program dicapai di akhir tahun
										Kontribusi Pariwisata terhadap PDRB	%	1.06				0		0		0		1.91		1.91	180.19				
3	3.26	03	2.01		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kota Makassar yang Dipasarkan	Destinasi	58	5,852,545,600		3,444,585,600		60,000,000		529,393,399		1,162,287,764		1,109,362,858		0	2,861,044,021	0.00	48.89					
3	3.26	03	2.01	01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah promosi melalui media cetak elektronik dan media lainnya baik dalam dan luar negeri yang mendapat penguatan	Media	17	1,460,234,000		1,338,274,000	1	42,000,000	3	68,500,000	10	426,946,500	3	462,354,000	17	999,800,500	100.00	68.47						
3	3.26	03	2.01	02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam dan luar negeri bagi industri pariwisata Kota Makassar yang difasilitasi	Kegiatan	7	2,693,613,000		1,407,613,000			2	360,983,399	2	367,035,600	3	479,231,910	7	1,207,250,909	100.00	44.82						
3	3.26	03	2.01	03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah data dan penyebaran informasi pariwisata Provinsi baik dalam dan luar negeri yang disediakan.	Dokumen	1	698,698,600		698,698,600		18,000,000	1	99,910,000		368,305,664		167,776,948	1	653,992,612	100.00	93.60						
3	3.26	03	2.01	04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah kerja sama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri yang dilaksanakan	Kemitraan	1	1,000,000,000		-									0	-	0.00	0.00						
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		75.00	51.72							
																			Predikat Kinerja		Sedang (S)	Rendah (R)							
3	3.26	04			PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PAD Sektor Ekonomi Kreatif	%	20			0		0		0		42		42		210.00								
								7,257,872,000		4,511,325,500		5,000,000		297,962,050		1,291,793,001		2,838,624,402		4,433,379,453		400.00	61.08	DISPAR	Indikator program dicapai di akhir tahun				
3	3.26	04	2.01		Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Kota Kreatif yang Dikembangkan dan Direvitalisasi	Prasarana	1	1,219,733,000		27,574,000		-		-				22,391,600	0	22,391,600	0.00	1.84						
3	3.26	04	2.01	01	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah prasarana kota kreatif yang dikembangkan dan direvitalisasi	Prasarana	1	1,219,733,000		27,574,000						1	22,391,600	1	22,391,600	100.00	1.84							
3	3.26	04	2.02		Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekosistem Kreatif yang Dikembangkan	Sub Sektor	16	6,038,139,000		4,483,751,500		5,000,000		297,962,050		1,291,793,001		2,816,232,802	0	4,410,987,853	0.00	73.05						
3	3.26	04	2.02	04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah infrastruktur yang dikembangkan	Lokasi	1	162,000,000		33,000,000						1	25,000,000	1	25,000,000	100.00	15.43							
3	3.26	04	2.02	05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah pameran dan pagelaran/Event yang diikuti atau dilaksanakan	kali	15	5,755,812,000		4,275,751,500		5,000,000	4	297,962,050	8	1,252,693,001	3	2,706,132,802	15	4,261,787,853	100.00	74.04						
3	3.26	04	2.02	07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah pelaku yang difasilitasi	orang	75	59,896,000		175,000,000		-			75	39,100,000		85,100,000	75	124,200,000	100.00	207.36						
3	3.26	04	2.02	08	Perlindungan Hasil Kreativitas	Jumlah pelaku yang difasilitasi	orang	50	60,431,000		-								0	0	0.00	0.00							
																			Rata-rata capaian kinerja (%)		80.00	59.73							
																			Predikat Kinerja		Tinggi (T)	Rendah (R)							
3	3.26	05			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase SDM Pariwisata yang Mendapat Sertifikasi	%	30							20		27.23		47.23		157.43								
								2,483,763,500		1,441,479,000		0		118,000,000		584,988,000		669,464,000		1,372,452,000		129.20	55.26	DISPAR	Indikator program dicapai di akhir tahun				
						Persentase SDM Ekonomi Kreatif yang Mendapat Peningkatan Kapasitas	%	20									25.84		25.84										
3	3.26	05	2.01		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Tingkat dasar	Orang	1,000	2,483,763,500		1,441,479,000		-	118,000,000	200	584,988,000		669,464,000	200	1,372,452,000	20.00	55.26							
3	3.26	05	2.01	01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah kompetensi SDM pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar yang dikembangkan	Orang	800	956,812,000		832,791,000				160	263,680,000	150	527,784,000	310	791,464,000	38.75	82.72							
3	3.26	05	2.01	02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata yang dilaksanakan	%	30	731,026,000		-								0	-	0.00	0.00							
3	3.26	05	2.01	04	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah tenaga kerja bidang pariwisata yang disertifikasi kompetensi	Orang	400	520,000,000		420,800,000				200	274,800,000	200	122,000,000	400	396,800,000	100.00	76.31							

	3	3.26	05	2.01	05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Komsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi dan konservasi ekonomi kreatif yang difasilitasi	Fasilitas	15	199,925,500		187,888,000			8	118,000,000	2	46,508,000	3	19,680,000	13	184,188,000	86.67	92.13			
	3	3.26	05	2.01	07	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM pariwisata dan ekonomi kreatif yang dimonitoring dan dievaluasi	Orang	3,000	76,000,000		-										0	-	0.00	0.00		
																						Rata-rata capaian kinerja (%)		45.08	50.23		
																						Predikat Kinerja		Sangat Rendah (SR)	Sangat Rendah (SR)		
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM												27,319,425,039		1,975,275,404		4,933,857,619		5,907,064,056		9,196,899,603		22,013,096,682				80.58	
																						TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM		75.95	70.19		
																						PREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM		Sedang (S)	Rendah (R)		

\* **Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :**

1. Komitmen Kepala Dinas Pariwisata dalam mencapai peningkatan kinerja angka kunjungan wisatawan

\* **Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja :**

1. Beberapa program dan kegiatan seperti indeks kepuasan dan pembenahan sarana kepariwisataan masih dalam proses sehingga kinerja belum dapat di ukur
2. Adanya Pandemi Covid-19 menyebabkan beberapa kegiatan difocussing

\* **Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :**

1. Kegiatan harus dapat terus dioptimalkan dalam upaya Pencapaian Target Kinerja Dinas Pariwisata

\* **Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :**

1. Program kegiatan dilaksanakan sesuai perencanaan Dinas Pariwisata

Disusun,

Makassar, 2021

**Plt. KEPALA DINAS PARIWISATA  
KOTA MAKASSAR**

Muhammad Roem, S.STP, M.SI

Nip. 19831110 200212 1 001

Dievaluasi,

Makassar, 2021

**KEPALA BAPPEDA  
KOTA MAKASSAR**

( \_\_\_\_\_ )

**EVALUASI HASIL RENCANA KERJA SKPD  
DINAS PARIWISATA KOTA MAKASSAR  
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2022**

No	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Satuan Kinerja	Target RENSTRA pada Tahun 2021-2026		Realisasi Capaian Kinerja RENSTRA SKPD / RENJA		Target Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD Tahun Berjalan yang dievaluasi 2022				Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA SKPD tahun 2022		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA		Realisasi Kinerja dan Anggaran RENSTRA SKPD Tahun 2022 (Akhir Tahun Pelaksanaan)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENSTRA		Unit SKPD Penanggung Jawab			
					K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000) RENJA	Rp. (000) DPA	I	II	III	IV	K	Rp. (000)	K	Rp.	K	Rp. (000)	K	Rp.	K		Rp.		
																	12 = 8+9+10+11	13 = 12/3*100		14 = 6 + 12		15 = 14/5*100						
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																										
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				219,739,713,000			61,210,466,000	64,110,466,000		1,227,760,844	10,366,660,048		0	0			11,594,420,892									
3	26	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	Persen	90			90			20							40			44.44		40		44.44		
				Persentase ketersediaan laporan keuangan dan laporan kinerja Perangkat Daerah	Persen	100	63,186,031,653		100	12,131,679,900	12,161,815,025	1.92	1,160,360,844	16.17	3,920,180,646				18.09	5,080,541,490		18.09	41.77	18.09	5,080,541,490	18.09	8.04	Dispar
				Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik	Persen	90			90			30			30				60			66.67		60		66.67		
3	26	1	02.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Dokumen	66	658,595,000		13	194,370,000	194,370,000	6	0	21,940,000				6	21,940,000	46.15	11.29	6	21,940,000	9.09	3.33		
3	26	1	02.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan	Dokumen	11	303,990,000		2	132,645,000	132,645,000	1	0	21,940,000				1	21,940,000	50.00	16.54	1	21,940,000	9.09	7.22		
3	26	1	02.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA yang Dihasilkan	Dokumen	5	43,900,000		1	7,050,000	7,050,000	1						1	0	100.00	0.00	1	0	20.00	0.00		
3	26	1	02.01	3 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA yang Disusun	Dokumen	5	41,750,000		1	6,950,000	6,950,000							0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3	26	1	02.01	4 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA yang Dihasilkan	Dokumen	5	41,350,000		1	6,700,000	6,700,000	1						1	0	100.00	0.00	1	0	20.00	0.00		
3	26	1	02.01	5 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA yang Disusun	Dokumen	5	41,355,000		1	6,725,000	6,725,000							0	0	0.00	0.00	0	0	0.00	0.00		
3	26	1	02.01	6 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Capaian Kinerja yang Dihasilkan	Dokumen	15	110,400,000		3	20,580,000	20,580,000	1						1	0	33.33	0.00	1	0	6.67	0.00		
3	26	1	02.01	7 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja yang Dihasilkan	Dokumen	20	75,850,000		4	13,720,000	13,720,000	1						1	0	25.00	0.00	1	0	5.00	0.00		
3	26	1	02.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun	Dokumen	90	48,330,651,653		18	8,309,303,830	8,309,303,830	1	1,028,021,461	2,264,875,648				3	3,292,897,109	16.67	39.63	3.00	3,292,897,109	3.33	6.81		
3	26	1	02.02	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Gaji dan Tunjangan dalam Setahun	Orang	315	44,525,459,653		61	7,582,583,830	7,582,583,830	58	967,701,461	1,961,835,648				116	2,929,537,109	190.16	38.64	116.00	2,929,537,109	36.83	6.58		
3	26	1	02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN yang disediakan	Orang	115	1,582,800,000		21	361,920,000	361,920,000	21	60,320,000	120,640,000				42	180,960,000	200.00	50.00	42.00	180,960,000	36.52	11.43		
3	26	1	02.02	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Tenaga Administrasi Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi (Non PNS) yang Disiapkan	Orang	30	396,000,000		6	108,000,000	108,000,000			3	54,000,000			3	54,000,000	50.00	50.00	3.00	54,000,000.00	10.00	13.64		
3	26	1	02.02	4 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah pelaksanaan akuntansi yang tersedia	Org	10	96000000		2	0	0							0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	26	1	02.02	5 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun yang Dihasilkan	Dok	5	34620000		1	0	0							0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	26	1	02.02	6 Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang Dihasilkan	Jenis	20	1,665,480,000		4	256,800,000	256,800,000	1		1	128,400,000			2	128,400,000	50.00	50.00	2.00	128,400,000.00	10.00	7.71		
3	26	1	02.02	8 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Laporan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran yang Dihasilkan	Dokumen	5	30292000		1	0	0							0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	26	1	02.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah jenis jasa administrasi barang milik daerah yang tersedia	Dokumen	15	137,510,000		3	0	0							0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	26	1	02.03	1 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah yang Dihasilkan	Dokumen	5	34940000		1	0	0							0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	26	1	02.03	4 Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Aktivitas Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah yang Tersedia	Keg	5	34190000		1	0	0							0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	26	1	02.03	5 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah dokumen rekonsiliasi dan penyusunan laporan Barang Milik Daerah yang dihasilkan	Dokumen	10	68380000		2	0	0							0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
3	26	1	02.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah jenis jasa administrasi kepegawaian yang tersedia	Jenis	14	1,338,000,000		2	185,500,000	185,500,000	0	126	59,310,000				0	59,310,000	0.00	31.97	0.00	59,310,000.00	0.00	4.43		
3	26	1	02.05	2 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas beserta atribut yang tersedia	Pasang	520	330,000,000		100	128,000,000	128,000,000			126	59,310,000			126	59,310,000	126.00	46.34	126.00	59,310,000.00	24.23	17.97		









**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Makassar  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD									Pariwisata Kota Makassar				
3 26 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				4 Laporan	11,672,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dinas Pariwisata Kota Makassar	4 Laporan	15,470,000	Dinas Pariwisata
<b>3 26 01 2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan yang Disusun	Dokumen		Dokumen	18 Dokumen	<b>8,035,884,180</b>						18 Dokumen	<b>9,633,949,006</b>	
3 26 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				58 Orang/bulan	7,406,724,180	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata Kota Makassar	58 Orang/bulan	8,871,241,006	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				15 Dokumen	383,160,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata Kota Makassar	15 Dokumen	316,560,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				12 Dokumen	126,000,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata Kota Makassar	12 Dokumen	72,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.02 06	Pengelolaan dan Penyipapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan				12 Dokumen	120,000,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Dokumen Administrasi Keuangan Dinas Pariwisata Kota Makassar	12 Dokumen	333,920,000	Dinas Pariwisata
<b>3 26 01 2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Kepegawaian yang Tersedia	Jenis		Jenis	2 Jenis	<b>355,000,000</b>						2 Jenis	<b>306,900,000</b>	
3 26 01 2.05 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				3 Paket	91,500,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pegawai Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	3 Paket	65,400,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.05 09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				25 Orang	263,500,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pegawai Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	25 Orang	241,500,000	Dinas Pariwisata
<b>3 26 01 2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa Administrasi Umum yang Tersedia	Jenis		Jenis	8 Jenis	<b>1,077,446,175</b>						8 Jenis	<b>951,998,600</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Makassar  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	21,659,600	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Fasilitasi saran dan Prasarana bagi Pegawai dan Tamu Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	1 Paket	24,361,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				5 Paket	132,574,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Fasilitasi saran dan Prasarana bagi Pegawai dan Tamu Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	5 Paket	86,588,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.06 03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				2 Paket	51,090,200	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Fasilitasi saran dan Prasarana bagi Pegawai dan Tamu Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	2 Paket	47,609,600	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	407,842,375	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Fasilitasi saran dan Prasarana bagi Pegawai dan Tamu Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	3 Paket	120,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.06 06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				7 Dokumen	14,280,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Fasilitasi saran dan Prasarana bagi Pegawai dan Tamu Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	7 Dokumen	12,240,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.06 08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				12 Laporan	100,000,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Fasilitasi saran dan Prasarana bagi Pegawai dan Tamu Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	12 Laporan	108,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	350,000,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Fasilitasi saran dan Prasarana bagi Pegawai dan Tamu Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	12 Laporan	536,000,000	Dinas Pariwisata
<b>3 26 01 2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah yang Tersedia	Jenis		Jenis	3 Jenis	<b>889,330,400</b>						3 Jenis	<b>265,000,000</b>	
3 26 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				48 Unit	889,330,400	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Pemenuhan Kebutuhan Kendaraan Dinas dan Peralatan Kantor bagi Pegawai Dinas Pariwisata	48 Unit	190,000,000	Dinas Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

**Kota Makassar**

**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
												Kota Makassar			
<b>3 26 01 2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Tersedia	Jenis		Jenis	3 Jenis	<b>952,809,600</b>						3 Jenis	<b>753,632,400</b>	
3 26 01 2.08 01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	716,644,800	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Jasa Penunjang Operasional bagi Pegawai Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	12 Laporan	477,763,200	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	236,164,800	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Jasa Penunjang Operasional bagi Pegawai Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	12 Laporan	227,869,200	Dinas Pariwisata
<b>3 26 01 2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Jumlah Jenis Jasa Pemeliharaan Barang Milik Daerah yang Tersedia	Jenis		Jenis	5 Jenis	<b>530,344,950</b>						5 Jenis	<b>578,531,800</b>	
3 26 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	45,174,450	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Kendaraan Dinas Jabatan, Operasional, dan Gedung Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	1 Unit	28,336,800	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	222,310,500	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Kendaraan Dinas Jabatan, Operasional, dan Gedung Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	30 Unit	299,975,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				81 Unit	72,860,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Kendaraan Dinas Jabatan, Operasional, dan Gedung Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	81 Unit	61,020,000	Dinas Pariwisata
3 26 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	190,000,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	1   Penguatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berdaya saing	Kendaraan Dinas Jabatan, Operasional, dan Gedung Kantor Dinas Pariwisata Kota Makassar	1 Unit	170,000,000	Dinas Pariwisata
<b>3 26 02</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>	Jumlah Destinasi Wisata yang berstandar Nasional Tingkat Hunian Akomodasi	Destinasi %		Destinasi %	1 Destinasi 48 %	<b>18,427,141,045</b>						1 Destinasi 48 %	<b>9,680,166,000</b>	
<b>3 26 02 2.01</b>	<b>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Daya Tarik Wisata yang Dibenahi	DTW		DTW	100 DTW	<b>4,834,900,100</b>						100 DTW	<b>5,090,000,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

**Kota Makassar**

**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
3 26 02 2.01 03	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				1000 Lokasi	4,834,900,100	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Tempat Daya Tarik Wisata Kota Makassar	1000 Lokasi	5,090,000,000	Dinas Pariwisata
<b>3 26 02 2.02</b>	<b>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kawasan Strategis Pariwisata yang Dibenahi	Kawasan		Kawasan	1 Kawasan	<b>1,086,834,600</b>						1 Kawasan	<b>1,950,709,000</b>	
3 26 02 2.02 04	Pengadaan/Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Unit	1,086,834,600	Kota Makassar, Ujung Pandang, Losari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Kawasan Strategis Pariwisata Kota Makassar	1 Unit	1,000,000,000	Dinas Pariwisata
<b>3 26 02 2.03</b>	<b>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Destinasi Pariwisata yang Dikelolah	Destinasi		Destinasi	1 Destinasi	<b>12,164,483,345</b>						1 Destinasi	<b>2,339,457,000</b>	
3 26 02 2.03 02	Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				3 Dokumen	515,200,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Destinasi Wisata Kota Makassar	3 Dokumen	400,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03 03	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				2 Lokasi	11,164,283,445	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Destinasi Wisata Kota Makassar	2 Lokasi	1,039,457,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03 05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Dokumen	200,000,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Destinasi Wisata Kota Makassar	1 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 02 2.03 06	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				2 Laporan	284,999,900	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Destinasi Wisata Kota Makassar	2 Laporan	600,000,000	Dinas Pariwisata
<b>3 26 02 2.04</b>	<b>Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota</b>	Jumlah TDUP yang Difasilitasi	TDUP		TDUP	200 TDUP	<b>340,923,000</b>						200 TDUP	<b>300,000,000</b>	
3 26 02 2.04 01	Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota				12 Dokumen	340,923,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Industri Pariwisata Kota Makassar	12 Dokumen	300,000,000	Dinas Pariwisata
<b>3 26 03</b>	<b>PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>	Lama Kunjungan Wisata	Hari %		Hari %	3.25 Hari 6.5 %	<b>6,654,700,000</b>						3.25 Hari 6.5 %	<b>7,739,685,000</b>	

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)  
Kota Makassar  
Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif	
										Nasional	Daerah				
		Persentase Peningkatan Perjalanan Wisatawan Nusantara Yang Datang Ke Kota Makassar Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan Mancanegara Perkebangsaan	%		%	3.5 %						3.5 %			
<b>3 26 03 2.01</b>	<b>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara dan Mancanegara Perkebangsaan	Orang		Orang	1797617 Orang	<b>6,654,700,000</b>					1797617 Orang	<b>7,739,685,000</b>		
3 26 03 2.01 01	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	2,639,411,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	2 Dokumen	1,893,560,000	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01 02	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri				14 Laporan	3,417,555,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	14 Laporan	3,585,198,000	Dinas Pariwisata
3 26 03 2.01 03	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri				2 Dokumen	597,734,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Wisatawan Nusantara dan Mancanegara	2 Dokumen	929,927,000	Dinas Pariwisata
<b>3 26 04</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang difasilitasi Mendapatkan HAKI PAD Sektor Ekonomi Kreatif	%		%	100 15.17 %	<b>7,922,253,385</b>					100 15.17 %	<b>5,950,000,000</b>		
<b>3 26 04 2.02</b>	<b>Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif</b>	Jumlah Kegiatan yang Mendukung Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Kegiatan		Kegiatan	10 Kegiatan	<b>7,922,253,385</b>					10 Kegiatan	<b>5,950,000,000</b>		
3 26 04 2.02 04	Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif				1 Unit	18,400,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Makassar	1 Unit	250,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 2.02 05	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif				29 Dokumen	7,575,332,385	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Makassar	29 Dokumen	5,100,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 04 2.02 07	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan atas Hak				5 Dokumen	328,521,000	Kota Makassar,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan	Pelaku Ekonomi Kreatif Kota	5 Dokumen	600,000,000	Dinas Pariwisata

**Penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)**

**Kota Makassar**

**Tahun 2023**

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Realisasi Capaian RKPD Tahun 2021	Prakiraan Capaian Target RKPD Tahun 2022	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan					Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
						Target 2023	Pagu Indikatif	Lokasi	Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
										Nasional					Daerah
		Cipta Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif						Makassar, Maccini		Yang Berkualitas dan Berkeadilan	kesejahteraan masyarakat	Makassar			
<b>3 26 05</b>	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>	Jumlah Peserta Pelatihan Skill Training Gratis Sektor Pariwisata Persentase Sdm Ekonomi Kreatif Yang Mendapat Peningkatan Kapasitas Persentase SDM Pariwisata Yang Mendapat Sertifikasi	Orang % %		Orang % %	800 Orang 10 % 6.4 %	<b>3,109,410,760</b>						800 Orang 10 % 6.4 %	<b>4,465,000,000</b>	
<b>3 26 05 2.01</b>	<b>Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Tersedia	Kegiatan		Kegiatan	6 Kegiatan	<b>3,109,410,760</b>						6 Kegiatan	<b>4,165,000,000</b>	
3 26 05 2.01 01	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya				650 Orang	1,024,715,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Tenaga Kerja Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Makassar	650 Orang	900,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 05 2.01 02	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata				200 Orang	323,738,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Tenaga Kerja Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Makassar	200 Orang	850,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 05 2.01 03	Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataan bagi Masyarakat, Guru dan Pelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)				150 Orang	211,698,000	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Tenaga Kerja Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Makassar	150 Orang	600,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 05 2.01 04	Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata				360 Orang	540,000,000	Kota Makassar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Tenaga Kerja Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Makassar	360 Orang	715,000,000	Dinas Pariwisata
3 26 05 2.01 05	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif				12 Laporan	1,009,259,760	Kota Makassar, Makassar, Maccini	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	4   Perkuatan ketahanan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat	Tenaga Kerja Pariwisata dan Pelaku Ekonomi Kreatif Kota Makassar	12 Laporan	700,000,000	Dinas Pariwisata
<b>TOTAL</b>							<b>48,284,094,495</b>							<b>40,681,297,806</b>	